

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan yang bersifat retribusi pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Menurut Mardiasmo dalam Fauzi (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Sedangkan kualitas kinerja keuangan merupakan ukuran baik buruknya suatu pelaporan keuangan pada satu periode tertentu. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Laporan Keuangan digunakan oleh pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, laporan

keuangan yang disajikan diharapkan mempunyai kualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Apabila laporan keuangan tidak sesuai karakteristik yang memadai, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, yang nantinya akan berdampak pada kerugian perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya (Anaan, 2020).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Armel, Nasir, & Safitri, 2017).

Ada beberapa yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu perencanaan anggaran. Laporan keuangan Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh

(MPDA) akan berkualitas apabila proses penyusunan anggaran tersusun dengan baik. Perencanaan anggaran yang baik mengatur hak-hak dalam memungut pendapatan yang sah dan mengalokasikan belanja sesuai dengan klasifikasi pendapatan dan belanja yang tepat. Setiap dinas atau badan pemerintah mempunyai rencana anggaran tersendiri berupa dokumen yang berisi program kerja maupun kegiatan selama 1 periode atau 1 tahun anggaran kerja yang diperlukan untuk melaksanakannya yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan RKA pemerintah dilakukan dengan klasifikasi anggaran yang tepat agar pengendalian anggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja anggaran tercipta dengan baik. Hasil akhir dari penyusunan RKA adalah laporan keuangan. Penyelesaian laporan keuangan merupakan yang paling penting dalam laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan suatu entitas. Tujuan dan sasaran organisasi dapat terwujud melalui perencanaan anggaran yang baik. Penyusunan anggaran dimulai pada awal periode (Januari) sampai akhir periode (Desember) pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif maka diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan anggaran yang baik tentunya berdampak baik terhadap perencanaan anggaran berikutnya, tetap jika perencanaan awal yang buruk, maka perencanaan anggaran berikutnya dapat berakibat buruk pula (Hikmah dan Busaini, 2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian intern. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian internal yang merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa

tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Setiap instansi pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada. Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pe

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh adalah badan normative berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan. Yang mempunyai Visi adalah menjadikan MPD sebagai badan berbasis masyarakat yang bersifat normatif , proaktif dalam mengaktualisasikan perannya secara optimal sebagai mitra pemerintah daerah dan masyarakat Aceh dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang aspiratif, relevan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya masyarakat yang cerdas, maju, beriman dan bertaqwa, serta berakhlak mulia.

<https://tkppa.acehprov.go.id/index.php/profil/>.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah selama ini dinilai sangat banyak dan kompleks. Permasalahan-permasalahan dan juga tantangan utama tersebut dapat diuraikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Masih Lemahnya kualitas SDM Aparatur pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah,
- b. Masih kurangnya disiplin PNS di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dalam memberikan pelayanan,
- c. Masih terbatasnya dukungan dana yang sangat terbatas dari sumber dana APBA untuk tingkat Provinsi maupun APBK untuk tingkat Kab/ Kota, sehingga percepatan program tidak terlaksana terutama di tingkat Kab/Kota.
- d. Belum tersedianya website Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dalam mempublikasikan Laporan Pengembangan Pendidikan Aceh (LPPA),
- e. Rata-rata Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah merupakan PNS yang sudah tua dan berpendidikan lulusan Sekolah Menengah Atas.

Selain itu banyak temuan yang ada di MPD Pemerintah Aceh yang menyebabkan kinerja dari MPD pemerintah Aceh kurang optimal diantaranya adalah rendahnya kualifikasi tenaga aparatur pada sekretariat, minimnya minat aparatur untuk ditempatkan pada Sekretariat MPD, kurangnya minat apartur untuk mengembang diri serta kurang nya sosialisasi dan bimbingan sehingga menyebabkan kinerja makin menurun. Selain itu sarana dan prasaran pendukung pada MPD

sangat minim ,belum ada SOP sebagai acuan kerja dalam memberikan pelayanan, serta dukungan fasilitas perpustakaan juga masih minim https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Renstra_MPD2012-2017.pdf. Dalam penelitian ini penyusunan anggaran dan sistem pengendalian internal dikaitkan untuk melihat hubungannya dengan peningkatan kualitas laproan keuangan. Apakah penyusunan anggaran sudah berjalan sesuai dengan rencana, sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, dan kualitas kinerja keuangan sudah dikatakan baik.

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern erhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.
2. Untuk mengetahui perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.
3. Untuk mengetahui pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pengendalian intern semakin luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh.

1.5 Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop bidang ilmu akuntansi sektor publik, dengan analisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Dengan skop penelitian terfokus pada kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh,

yang lebih menitik beratkan pada perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Majelis Pendidikan Daerah Aceh yang beralamat Jalan T. Nyak Arief No. 221, Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH ACEH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana

Oleh

**RINALDI SYAHRONI
NPM : 19100070
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Skop Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	8
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	8
2.1.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan.....	9
2.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	10
2.2 Perencanaan Anggaran	13
2.2.1 Pengertian Perencanaan Anggaran	13
2.2.2 Manfaat Anggaran	14
2.2.3 Indikator Perencanaan Anggaran.....	15
2.3 Pengendalian Intern	16
2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern	16
2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern	17
2.3.3 Indikator Pengendalian Intern.....	18
2.4 Penelitian Terdahulu	19
2.5 Kerangka Konseptual	20
2.6 Hipotesis Penelitian	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel	24
3.2 Metode Penarikan Sampel	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Operasional Variabel	26
3.5 Metode Analisis Data.....	29

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	36
4.3 Analisis Deskriptif.....	38
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	43
4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas	43
4.4.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas	44
4.4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	45
4.5 Hasil Uji Hipotesis	46
4.5.1 Hasil Pengujian Secara Simultan.....	46
4.5.2 Hasil Uji Secara Parsial	47
4.6 Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	48
4.7 Pembahasan.....	49
4.7.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap kualitas Laporan Keuangan	49
4.7.2 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap kualitas Laporan Keuangan.....	49
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
 DAFTAR PERPUSTAKAAN	53